



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, NIK -----, tempat/ tanggal lahir Gunung Tua/15 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON ASLI II, NIK -----, tempat/ tanggal lahir Huta Pasir/8 Juni 1993, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tohirudin Siregar, S.H.I, M.H,C.P.M Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 113/SK/IX/2024, tertanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 152/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 09 September 2024 perkara Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Psp sebagai Kuasa para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 126/Pdt.P/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama PEMOHON ASLI II yang dilaksanakan di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, dan dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 28 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 20 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1 ANAK I (Lk), lahir pada tanggal 12 Maret 2014;
 - 5.2 ANAK II (Pr), lahir pada tanggal 23 Oktober 2017;
 - 5.3 ANAK III (Ik), lahir pada tanggal 2 November 2019;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II), yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain



yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan sehubungan dengan pengesahan nikah para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama kuasanya telah hadir secara in-person di persidangan;

Bahwa, dalam perkara aquo para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.HI., MH, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN, SIREGAR, S.HI., MH & REKAN yang berkantordi Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus 113/SK/VII/2024 tanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 152/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tidak perubahan:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI I tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI II tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-2);



3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B.902/Kua.02.27.01/PW.01/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON ASLI , tempat/tanggal lahir Saba Sitahul-Tahul/05 April 1983, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Lintas Binanga, Desa Saba Sitahul-Tahul, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2013 secara islam di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bonar Nasution dengan saksi nikahnya adalah Sahlan Nasution dan Munir Hasibuan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;



- Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan juga para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk kejelasan terkait status pernikahan para Pemohon serta untuk persyaratan pengurusan buku nikah para Pemohon;
2. SAKSI II PEMOHON ASLI , tempat/tanggal lahir Huta Pasir/05 Desember 1962, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnyatelah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon karena saksi adalah wali pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2013 secara islam di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan saksi nikahnya adalah Sahlan Nasution dan Munir Hasibuan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan juga para Pemohon belum pernah bercerai;



- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk kejelasan terkait status pernikahan para Pemohon serta untuk persyaratan pengurusan buku nikah para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikankesimpulansecara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligamitanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 113/SK/IX/2024, tertanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 152/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 09 September 2024;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon yang bernama TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 06 September 2024 yang dibuat oleh para Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa (TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum para Pemohon memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini; Kewenangan Mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Padangsidempuan; Kewenangan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya



keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Hakim menilai para Pemohon sudah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara Islam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pernikahan tersebut telah memenuhi serta syarat perkawinan dan tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dalam melaksanakan pernikahan menggunakan ayah kandung Pemohon yang bernama Bonar Nasution sebagai wali nikahnya dengan saksi nikah para Pemohon adalah Sahlan Nasution dan Munir Hasibuan dan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon serta sebagai syarat untuk pengurusan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (he who asserts must prove) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis Pembuktian



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Menikah Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bukti P-3 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Nikah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti primer yang membuktikan fakta peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan semata yang harus ditambah dengan bukti lain yang relevan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dinyatakan para Pemohon telah menikah tanggal 07 Mei 2013 di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga bukti P-3 menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. disamping itu saksi-saksi tersebut sudah diperiksa secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan telah terjadi peristiwa pernikahan para Pemohon;
Konstatasi Fakta-Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 telah terjadi akad nikah antara PEMOHON ASLI I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON ASLI II (Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan Islam di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bonar Nasution dengan saksi nikahnya adalah Sahlan Nasution dan Munir Hasibuan dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon. Disamping itu para Pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar status pernikahan para Pemohon jelas serta bisa mengurus persyaratan untuk pembuatan buku nikah;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri);
- (2) Wali nikah
- (3) Dua orang saksi nikah
- (4) Ijab kabul;



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab l'anatutthalibin Juz 4 halaman 290 yang berbunyi:

لودع نيدهاشو يلو وحن نم هطورشو هتخص ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعدلا نفو

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil/ hujjah syar'iyah sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هسكعك هتقدص نا ةأرما حاكنب لقاعلا غلابلا رارقا لبق

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bonar Nasution, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwasanya "wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dan ternyata dalam fakta persidangan yang menjadi wali nikah para Pemohon



adalah ayah kandung Pemohon II sendiri maka menurut Hakim telah sesuai dengan aturan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

KESIMPULAN TERHADAP PETITUM ANGKA 1 DAN 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara para Pemohon yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, ternyata telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan



pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 yang dilaksanakan di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

PETITUM ANGKA 3 (PERINTAH PENCATATAN PERKAWINAN)

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Buku II terbaru halaman 131, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara). Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1);

PETITUM ANGKA 4 (PEMBEBANAN BIAYA)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinanPemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwa; 1446 Hijriah oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H, M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.
Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana, S.H, M.Kn

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

□ Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
□ Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
□ Redaksi	:	Rp	10.000,00
□ Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
□ Panggilan	:	Rp	0,00
□ Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);